



**LAPORAN KEGIATAN DEKLARASI
10 AGENDA POLITIK PEREMPUAN**
PERINGATAN HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL
JAKARTA, GD USMAR ISMAIL, 7 MARET 2014



**Dilaporkan oleh :
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
(Penanggung Jawab Deklarasi)**



LAPORAN KEGIATAN DEKLARASI 10 AGENDA POLITIK PEREMPUAN¹

I. Latar Belakang

Hasil refleksi organisasi-organisasi perempuan menunjukkan bahwa ritual politik lima tahunan untuk rekrutmen dan penggantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu (Pemilihan Umum), tidak secara otomatis berkorelasi dengan terwujudnya kesejahteraan serta kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya gerakkan perempuan untuk mewujudkan keadilan secara substantive (Substantive Equality) melalui peningkatan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap peserta Pemilihan Umum, pun tidak serta merta menghasilkan 30% keterwakilan perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil Pemilu 2009 membuktikan bahwa jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) meskipun mengalami peningkatan secara drastis, namun belum berhasil mencapai 30% perempuan.

Pemilu 2009 menghasilkan 101 atau 18% di DPR RI, sedangkan di tingkat provinsi secara agregat nasional yang meliputi 33 provinsi, menghasilkan 321 atau 16 persen perempuan dari total 2.005 anggota DPRD provinsi. Jumlah tersebut naik, jika dibandingkan hasil Pemilu 2004 yang hanya 12 persen. Sedangkan Keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota, juga mengalami peningkatan. Dari 461 kabupaten/kota yang tersedia datanya, memiliki 15.750 anggota. Dari jumlah tersebut, terpilih 1.857 perempuan atau 12%. Persentase ini naik hampir dua kali lipat, karena Pemilu 2004 hanya menghasilkan 6% perempuan di DPRD kabupaten/kota.

Dari Hasil Pemilu 2009, sudah ada Propinsi yang keterwakilan perempuan melebihi 30% yaitu Prov. Maluku : 14 perempuan dari 45 orang atau 31%. Namun di tingkat kabupaten/kota, masih terdapat DPRD yang tidak memiliki anggota perempuan. Dari 461 kabupaten/kota, terdapat 27 DPRD yang tidak ada anggota perempuan terpilih. Yaitu tersebar di Aceh, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Tercatat pula 64 DPRD kabupaten/kota yang hanya memiliki satu anggota perempuan

¹ DILAPORKAN OLEH KOALISI PEREMPUAN INDONESIA SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN DEKLARASI 10 AGENDA POLITIK PEREMPUAN.



Disamping target pencapaian angka minimal 30% keterwakilan perempuan di lembaga dewan perwakilan rakyat, masih belum tercapai, beberapa indikator utama kesetaraan dan keadilan gender justru semakin memburuk.

Indikator utama kesetaraan dan keadilan gender, yang semakin memburuk antara lain : meningkatnya Angka Kematian Ibu melahirkan dari 228/100.000 kelahiran hidup menjadi 359/100.000 kelahiran hidup. Lahirnya 342 kebijakan di tingkat nasional dan lokal, yang terbukti mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan dengan basis moralitas (dilaporkan oleh KOMNAS Perempuan per Agustus 2013), meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, baik bersifat seksual, fisik maupun ekonomi, tingginya angka buta huruf, dan putus sekolah, terutama dialami oleh perempuan pedesaan, rendahnya akses terhadap pekerjaan yang layak, meningkatnya jumlah perempuan pekerja rumah tangga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang menjadi korban eksploitasi dan meningkatnya jumlah kasus dan modus kejahatan perdagangan perempuan dan anak. Disamping itu, praktek-praktek berbasis tradisi dan kebiasaan yang mendiskriminasi perempuan, seperti khitan (sunat) perempuan dan perkawinan anak, masih terus berlanjut.

Sebagian besar dari persoalan-persoalan tersebut selalu dipandang sebagai persoalan kecil (mikro) dan persoalan personal, serta tidak memiliki keterkaitan terhadap politik. Sehingga dalam upaya pencegahan dan penanganannya tidak dikaitkan dengan keseluruhan rencana pembangunan negara di segala aspek kehidupan, dan cenderung menyalahkan perempuan.

Berdasarkan analisis situasi perempuan yang semakin memburuk tersebut, disadari bahwa mendorong keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan di lembaga pengambilan keputusan tanpa membekali agenda yang lebih substantive, tidaklah cukup untuk mewujudkan demokrasi, kesetaraan dan keadilan gender serta perdamaian.

II. Tujuan Kegiatan

Tujuan Umum

Tujuan Umum dari Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan, adalah tujuan GERAKAN PEREMPUAN MEWUJUDKAN INDONESIA BERAGAM, yaitu

- 1) Mendesakkan 10 Agenda Politik gerakan perempuan dan kelompok-kelompok marjinal kepada Partai politik, calon legislatif dan pemerintahan baru agar memenuhi hak-hak perempuan dan kelompok marginal tanpa diskriminasi.



- 2) Melakukan penyadaran publik agar masyarakat memahami dan memberikan dukungan terhadap upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan kelompok-kelompok marjinal yang didesakkan melalui 10 Agenda Politik Perempuan kepada pemerintahan baru.
- 3) Memperkuat konsolidasi gerakan perempuan di Indonesia untuk mengembangkan isu dan strategi yang strategis dalam mendesak dan memantau pemenuhan hak-hak perempuan dan kelompok-kelompok marjinal oleh pemerintah

Tujuan Khusus

Tujuan Khusus Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan, adalah

- 1) Mendeklarasikan 10 Agenda Politik Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam
- 2) Meminta Komitmen Partai Politik Terhadap 10 Agenda Politik Perempuan
- 3) Mengumumkan Terbentuknya Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam
- 4) Peluncuran/Dimulainya Bulan Agenda Politik Perempuan (7 Maret-7 April)
- 5) Agenda Politik Perempuan melalui Pameran Foto, pameran instalasi dan panggung seni

III. Hasil yang Hendak Dicapai

Hasil yang hendak dicapai oleh Gerakan Indonesia Beragam adalah:

1. Adanya Buku 10 agenda politik perempuan yang mencakup isu hak kesehatan reproduksi, hak pendidikan, hak terbebas dari kekerasan terhadap perempuan, perlindungan sosial perempuan, hak akan Keamanan perempuan dari kekerasan dan konflik, hak atas pekerjaan, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak politik, penegakan hukum untuk keadilan gender, dan penghentian korupsi.
2. Meluasnya kesadaran dan dukungan publik terhadap 10 Agenda Politik Perempuan untuk pemerintahan baru khususnya di 23 propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa barat, Jateng dan DIY, Jatim, Bali, Sulawesi Tengah, dan Maluku dll.(lihat bagian target wilayah)
3. Menguatnya proses-proses konsolidasi gerakan perempuan untuk merespons situasi sesuai dengan konteksnya. Penguatan ini akan berdampak pada menguatnya posisi tawar gerakan dalam mendesak dan memonitoring pemenuhan hak-hak perempuan dan kelompok-kelompok marjinal oleh pemerintah.
Adanya sekitar 100 organisasi dan 10 individu yang bergabung menjadi penyelenggara dalam aksi bersama ini.

Hasil yang hendak dicapai dalam Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan adalah :



1. Adanya 600 exemplar Buku Agenda Politik untuk disampaikan kepada partai politik, calon anggota legislative dan peserta deklarasi.
2. Pengurus dari 12 Partai Politik dan sekurang-kurangnya 24 Calon anggota legislative perempuan (masing-masing partai 2 caleg perempuan) hadir dalam Deklarasi dan menyampaikan komitmennya terhadap 10 Agenda Politik Perempuan.
3. Sebanyak 400 orang perempuan sebagai peserta kegiatan Deklarasi Agenda Politik Perempuan
4. Terpublikasikannya terbentuknya Gerakan Perempuan Mewujudkan Agenda Politik Perempuan
5. Terpublikasikannya Bulan Agenda Politik Perempuan.

IV. Pelaksanaan

A. Persiapan

1. Proses Pembentukan Gerakan Indonesia mewujudkan Indonesia Beragam, Penyusunan 10 Agenda Politik Perempuan & Bulan Agenda Politik Perempuan

- a. Pertemuan awal konsolidasi gerakan perempuan merespon pemilu, pada 8 Januari 2014, di kantor Koalisi Perempuan Indonesia, yang dihadiri oleh AMAN Indonesia, Migrant CARE, Institute Kapal Perempuan, Solidaritas Perempuan, Kalyanamitra dan Our Voice, menyepakati pentingnya gerakan bersama untuk merespon pergantian kepemimpinan nasional.

Dalam pertemuan konsolidasi tersebut, disepakati pula, bahwa tradisi Koalisi Perempuan Indonesia menerbitkan Agenda Politik, harus diubah menjadi Agenda Politik organisasi-organisasi perempuan, yang dirumuskan dan disusun secara bersama. Agenda Politik yang kemudian disebut 10 Agenda Politik Perempuan ini, diharapkan dapat menjadi suatu *common Platform* (Platform bersama), yang dapat dinegosiasikan dan dimintakan komitmen dari partai-partai politik, calon anggota legislative dan calon Presiden & Wakil Presiden. Diharapkan bahwa pemerintahan baru memiliki kesamaan platform dengan gerakan feminisme terkait dengan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Persoalan utama dan usulan agenda yang terkandung dalam 10 Agenda Politik Perempuan adalah (1) Pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksualitas (HIV/AIDS, AKI, sunat perempuan, perkawinan anak); (2) Pemenuhan hak atas Pendidikan; (3) Penghentian Kekerasan terhadap Perempuan (Kekerasan



Seksual, kekerasan berbasis struktural, berbasis agama, trafficking); (4) Penghentian pemiskinan perempuan dan kelompok marginal (perempuan perbatasan, terpencil dan disabilitas) melalui Perlindungan Sosial; (5) Perlindungan perempuan dalam situasi konflik, Bencana serta Pengelolaan Lingkungan dan Sumber daya Alam; (6) Pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi perempuan(Perlindungan Buruh Migrant, PRT , PRT Migrant, Sektor Informal, Buruh Perempuan); (7) Perlindungan atas kebebasan Berkeyakinan dan beragama; (8) Hak Politik Perempuan (Hak Berorganisasi, Partisipasi pengambilan keputusan, Kewarganegaraan); (9) Penghapusan produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas; (10) Penghentian korupsi.

Kesepuluh Agenda Politik Perempuan tersebut menggambarkan bahwa persoalan perempuan satu dan lainnya saling berkelindan dan memiliki hubungan sebab akibat serta menuntut penanganan secara menyeluruh. Agenda Politik ini juga memberi pesan kuat bahwa tak satupun urusan personal perempuan yang tidak politis, *Personal is Political* dan bahwa semua masalah adalah masalah politik, *all issues are political issues*

- b. Pada pertemuan konsolidasi ke dua, Selasa, 21 Januari 2014 di kantor Institute Kapal Perempuan dibahas tentang pentingnya membangun visi bersama yang menaungi 10 Agenda Politik Perempuan, serta nama kelompok yang akan mengawal 10 Agenda Politik Perempuan. Dalam pertemuan inilah kemudian disepakati visi bersama Indonesia di masa depan, yaitu Indonesia yang Berdaulat, Bersih, Sejahtera, Adil Gender, dan Majemuk yang kemudian disebut INDONESIA BERAGAM.

Organisasi-organisasi yang mengawal agenda politik tersebut adalah Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam. Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam adalah Gerakan Perempuan membangun peradaban Indonesia yang bersih dari korupsi, bebas dari kemiskinan, bebas dari segala bentuk kekerasan dan rasa takut untuk mencapai keadilan dan kedaulatan bagi rakyat miskin, perempuan dan kelompok marginal.

Pada pertemuan ke dua ini dibahas kembali detail kegiatan dan penanggung jawab kegiatan yang akan dilakukan selama Bulan Agenda Politik, rencana memperluas deklarasi di luar Jakarta serta pembagian tugas masing-masing organisasi.



Selain itu, dalam pertemuan kedua ini juga disepakati Koordinator Gerakan Indonesia Beragam, yaitu Ruby Kholifah (AMAN Indonesia) dan Tim Inti Gerakan Indonesia Beragam terdiri dari : Anis Hidayah (Migrant CARE), Dian Kartikasari (Koalisi Perempuan Indonesia), Misiyah (Institute Kapal Perempuan) dan Ruby Kholifah (AMAN Indonesia)

- c. Pertemuan ke tiga pada 14 Februari 2014 di Kapal Perempuan, membahas tentang pembagian tugas organisasi penyusun Agenda Politik Perempuan, format penulisan Agenda Politik dan batas akhir pengumpulan tulisan. Disamping itu, dibahas pula strategi menghubungkan isu-isu dalam Agenda Politik Perempuan dengan isu pembangunan yang sedang di bahas di tingkat nasional maupun internasional seperti : Post MDG-2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Disamping itu, dalam pertemuan ini juga dibahas strategi penggalangan dana untuk memperluas gerakan dan mematikan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dalam Bulan Agenda Politik.

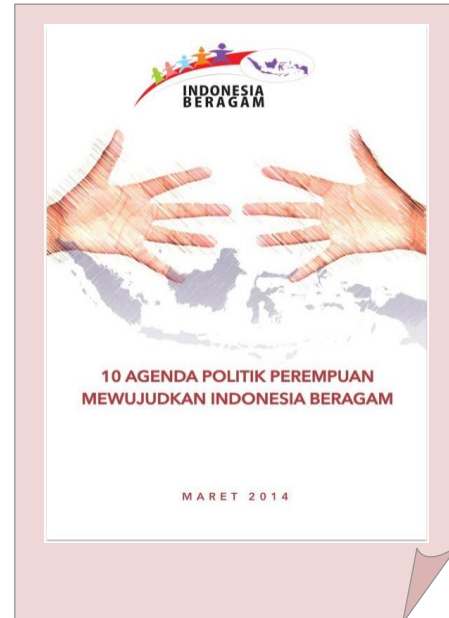
- d. Pertemuan Ke empat pada 21 Februari 2014 di Kantor AMAN Indonesia, membahas perkembangan penyusunan substansi Agenda Politik, mekanisme finalisasi dan informasi perkembangan daerah yang akan melaksanakan deklarasi Agenda Politik Perempuan, serta keputusan desain logo Indonesia Beragam.

Disamping itu, dalam pertemuan ini disepakati penggabungan beberapa gerakan yang akan menyenggarakan kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional, serta menentukan rapat teknis untuk penyelenggaraan kegiatan Deklarasi Agenda Politik Perempuan.

Pertemuan selanjutnya berupa pertemuan teknis, persiapan pelaksanaan deklarasi

2. Penyusunan Agenda Politik Perempuan

Agenda Politik disusun oleh organisasi-organisasi yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam. Masing-masing organisasi merumuskan situasi terkini, landasan hukum nasional dan instrument hukum internasional dan agenda yang direkomendasikan. Kemudian dilakukan penyuntingan (editing) dan penyelarasan akhir.



Penyusun 10 Agenda Politik adalah :

10 AGENDA POLITIK PEREMPUAN

- 1 Agenda 1. Pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksualitas, disusun oleh Titiana Adinda (Our Voice), Lilis.(Kalyanmitra) , Rena H (kalyanamitra)
- 2 Agenda 2. Pemenuhan hak atas Pendidikan terutama pendidikan perempuan, disusun oleh Institute Kapal Perempuan.
- 3 Agenda 3. Penghentian Kekerasan terhadap Perempuan, disusun oleh Perempuan Mahardika, Kalyanamitra, kontributor materi KIAS
- 4 Agenda 4. Penghentian pemiskinan perempuan dan kelompok marginal, disusun oleh Institute Kapal Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia, kontributor data PEKKA
- 5 Agenda 5. Perlindungan perempuan dalam situasi konflik, Bencana serta Pengelolaan Lingkungan dan Sumber daya Alam, disusun oleh Solidaritas Perempuan, Institute Global Justice, AMAN Indonesia
- 6 Agenda 6. Pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi perempuan, disusun oleh Migrant CARE
- 7 Agenda 7. Perlindungan atas kebebasan Berkeyakinan dan beragama disusun oleh AMAN Indonesia, LBH Jakarta
- 8 Agenda 8. Hak Politik Perempuan disusun oleh Koalisi Perempuan Indonesia

- 9 Agenda 9. Penghapusan produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas, disusun oleh AMAN Indonesia
- 10 Agenda 10. Penghentian korupsi disusun oleh Koalisi Perempuan Indonesia

Penyunting :

1. Misiyah (Institute Kapal Perempuan)
2. Ruby Kholifah (AMAN Indonesia)
3. Anis Hidayah (Migran Care)

Penyelaras Akhir : Dian Kartika Sari (Koalisi Perempuan Indonesia)

2. Media Briefing

Media Briefing diselenggarakan oleh Migrant CARE, pada 6 Maret 2014 di Warung Daun, Cikini. Media Briefing ini dihadiri oleh 6 Media Massa, yaitu : The Jakarta Post, Aliansi Jurnalis Indonesia, Kompas TV, Harian Kompas, Harian dan Koran Tempo dan Majalah Gatra

Media Briefing ini dimaksudkan untuk memperkenalkan adanya Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam, 10 Agenda Politik Perempuan serta rencana penyelenggaraan Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan yang akan dilaksanakan pada 7 Maret 2014





Hadir perwakilan Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam yang memberikan informasi kepada media adalah : Anis Hidayah (Migrant CARE/Host) Dian Kartika sari (Koalisi Perempuan Indonesia) Misiyah (Kapal Perempuan), Nani Zulminarni (PEKKA), dan Puspa Dewi (Solidaritas Perempuan)

3. Pelaksanaan Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan

Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan, diselenggarakan pada 7 Maret 2014, di Gedung Usmar Ismail, Jl Rasuna Said Kav 22, Kuningan Jakarta, bertepatan dengan Peringatan Hari Perempuan Internasional

Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan ini dihadiri oleh lebih dari 500 orang, terdiri dari perwakilan komunitas, perwakilan organisasi perempuan, organisasi Pro demokrasi dan HAM, aktifis, dan perwakilan lembaga donor, dan Perwakilan dari Komnas Perempuan, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Media Massa .



Perwakilan komunitas yang hadir dalam Deklarasi 10 Agenda Politik ini, berasal dari Jakarta, Bekasi, Cianjur, Depok, Cianjur, Indramayu, meliputi:

- Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia (Anggota dan Struktur organisasi Koalisi Perempuan di tingkat desa/kelurahan/komunitas)
- Sekolah Perempuan (dampingan Institute Kapal Perempuan)
- Sekolah Perdamaian (dampingan AMAN Indonesia)
- Serikat Perempuan Kepala Keluarga (bagian dari organisasi PEKKA)
- Kelompok Perempuan Mantan Buruh Migrant (Dampingan Migrant CARE)
- Kelompok Perempuan dampingan Solidaritas Perempuan

- Kelompok Perempuan dampingan Kalyamitra

Disamping itu, deklarasi ini juga dihadiri oleh 9 Perwakilan Partai Politik:

Hadir dalam kegiatan ini 9 perwakilan dari Partai Politik



No	Partai Politik	Hadir
1	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	Ibu Binny Buchory Caleg DPR RI
2	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Bpk Dedy Ramanta (Wasekjen) Bpk Kesri Kurniawan Ibu Titi Syahsusilawati Ibu Lathifa Al Anshori Caleg DKI Ibu Titin Kartini (Garut) Ibu Samratuti SKM
3	Partai Pesatuan Pembangunan (PPP)	Kencana Indriswari
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Delegasi Wasekjen Ibu Sumaryati Caleg DPRD DKI Tunggal Pramesti DPR RI Eva Kusuma Sundari DPR RI
5	Partai Demokrat	Ibu Emma (Bidang Pemberdayaan Perempuan Partai)

6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-
7	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Ibu Wendy Caleg Dapil DKI Ibu Rahmi Caleg Dapil DKI Ibu Shinta D Djandam Caleg Dapil Kalimantan Tengah
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	-
9	Partai Hati Nutrani Rakyat (Hanura)	Ibu Soemintarsih Beberapa kawan DPD RI
10	Partai Kebangkitan bangsa (PKB)	Bp KH Maman Imanul Haq
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	Wasekjen (Ibu Venty) Ibu Ririn Sundari
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Ibu Juawita L Suling Ibu Bea Larasati Iskandar

Pembacaan Deklarasi

Deklarasi dibacakan oleh 10 perempuan, setiap orang membacakan 1 agenda. Perempuan pembaca agenda ialah 5 orang dari perwakilan kelompok pemuda (GMNI, Korpri (PMII), Sarinah (PMKRI) dan GMKI) dan 5 perwakilan komunitas (dampingan Solidaritas Perempuan, Sekolah Perdamaian, Sekolah Perempuan Ciliwung), Balai Perempuan Rawa Teratai (Koalisi Perempuan) mantan Buruh Migrant (Dampingan Migrant CARE, komunitas Kalyanamitra)



Ibu-ibu dari komunitas membacakan deklarasi (7/03/2014)



Kelompok mahasiswa membacakan Deklarasi (7/03/2014)

Sejumlah 8 Partai Politik menandatangani Komitmen

Setelah pembacaan Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan, dilanjutkan dengan tanggapan dan komitmen dari partai politik. Dari 9 Partai politik yang hadir, sebanyak 7 perwakilan Partai Politik menandatangani Pernyataan Komitmen terhadap 10 Agenda Politik, yaitu : 1) Partai Golongan Karya (Golkar) , 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), 3) Partai Nasional Demokrat (Nasdem), 4) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 5) Partai Kebangkitan bangsa (PKB), 6) Partai Bulan Bintang (PBB), 7) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

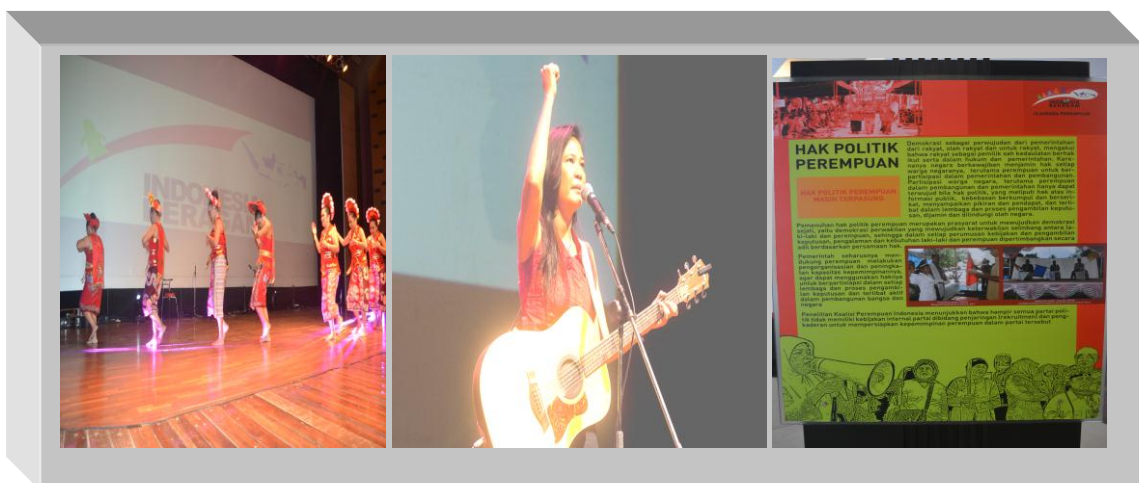


Sejumlah 8 Parpol menandatangani Deklarasi 10 Agenda Politik (7/03/2014)

Sebanyak 2 Partai Politik lainnya tidak ikut dalam penandatanganan deklarasi, karena tidak ada mandate dari partai politik masing-masing.

Pentas Seni

Kegiatan ini juga melibatkan seniman/pegiat seni : Opie Andarista, Kelompok Tari (isteri Expatriat), kelompok music (mahasiswa), Andreas (pembuat pameran Instalasi).





3. Perluasan Deklarasi dan Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam

Sampai dengan tanggal 7 Maret, organisasi yang menyatakan menjadi bagian dari Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam telah mencapai 140 Organisasi, *daftar organisasi yang terlibat, terlampir.*

Selain perluasan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam Deklarasi 10 Agenda politik. Perluasan gerakan juga dilakukan melalui pelibatan organisasi pemuda dan mahasiswa. Sejumlah kaum muda terlibat sebagai peserta dan panitia yaitu mereka dari organisasi GMNI, Korpri PMII, Sarinah (PMKRI) dan GMKI

Selain dilaksanakan di Jakarta, pada saat yang sama, 7 maret 2014 Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan dilaksanakan di Bali diselenggarakan kerjasama Koalisi Perempuan Indonesia, Bali Sruti, LBH Apik Bali dan Kaukus Perempuan Politik Perempuan

Pada tanggal 8 Maret 2014 Deklarasi juga dilaksanakan di :

Di Sulawesi Selatan dilakukan Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan dan Jalan Santai Bersama, start awal dan finish di Anjungan Pantai Losari, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Gerak jalan santai ini melibatkan kurang lebih 1000 orang, kegiatan ini akan dibuka oleh Walikota Makassar. Diselenggarakan oleh Koalisi aktivis Perempuan Sulsel yang terdiri dari FPMP, KPI, SP, LBH Apik, YKPM, YLK dan Yasmib

Di NTT dilakukan: Talkshow Radio Biro Pemberdayaan Perempuan NTT Bersama Organisasi Perempuan membahas 10 Agenda Politik Perempuan

Di Bengkulu dilakukan Deklarasi dan Talkshow radio, acara ini diselenggarakan oleh WCC Bengkulu, Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Bengkulu, Calon Anggota Legislatif, Universitas dan berbagai organisasi perempuan lainnya.

Di Medan dilakukan Konferensi Pers dan penyampaian pernyataan Tentang “Cerdas Memilih, Pilih Perempuan untuk kepentingan Perempuan dan Rakyat” serta Pembacaan Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan, kegiatan ini dilaksanakan Kelompok Aktivis Perempuan SUMUT, Pesada, Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sumatra Utara dan PERMAMPU.



Di Jember dilakukan Deklarasi Agenda Politik, dihadiri oleh aktivis perempuan dan calon anggota legislative, pada 15 Maret 2014

V. Capaian Kegiatan

Capaian Kegiatan Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan antara lain :

1. Tercetak dan terdistribusikannya 600 Exp Agenda Politik Perempuan
2. Hadirnya 9 partai Politik
3. Hadirnya calon anggota legislative perempuan dan laki-laki
4. Adanya 7 Partai Politik yang mendatangi komitmen untuk memperjuangkan 10 Agenda Politik Perempuan
5. Hadirnya lebih dari 500 orang peserta deklarasi
6. Hadirnya 13 media massa
7. Meluasnya Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan di Bali, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sumatra Utara
8. Terbangunnya kerja sama antar organisasi perempuan, baik dalam kepanitiaan dan proses penyiapan substansi 10 Agenda Politik Perempuan

Analisis Capaian

Dilihat dari substansi, Gerakan Perempuan mewujudkan Indonesia Beragam ini mampu menyepakati 10 agenda penting yang akan dimintakan komitmen kepada calon pemimpin Indonesia untuk periode 5 tahun ke depan.

Proses perumusan struktur dan substansi agenda politik menjadi proses interaksi antar individu dan organisasi mendorong kebersamaan pihak-pihak, sekaligus merupakan momentum awal untuk mengkonsolidasikan pemikiran dan gagasan.

Buku agenda politik yang dibagikan kepada calon anggota legislative dan peserta deklarasi menjadi sumber pengetahuan untuk memahami isu-isu strategis yang penting untuk diperjuangkan di masa yang akan datang.

Dilihat dari sisi jumlah dan keberagaman, penyelenggaraan Deklarasi 10 Agenda politik ini melampaui target dari yang direncanakan, yaitu dari yang direncanakan dapat melibatkan sekitar 53 organisasi, ternyata pada sampai dengan tanggal 7 Maret 2014, sekitar 140 organisasi terlibat dalam Deklarasi Agenda politik Perempuan. Dilihat dari peserta yang hadir dalam acara deklarasi, yang awalnya direncanakan melibatkan sekitar 400



perempuan dari Jakarta, Bogor Depok, Tangerang dan Bekasi, ternyata hadir lebih 500 peserta deklarasi dari Jakarta, Bogor Depok, Tangerang dan Bekasi, Kerawang, Indramayu, Garut dan Cianjur.

Dilihat dari partai yang hadir dan bersedia menandatangani komiytmen memperjuangkan 10 Agenda politik, dari target sekurang-kurang 6 parati politik hadir dan menandatangani deklarasi tersebut, ternyata capaiannya melebihi target yaitu hadirnya 9 partai politik dan adanya 7 partai politik yang menandatangani deklarasi.



LAMPIRAN

1. Daftar Media Yang Hadir
2. Panitia Penyelenggara Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan
3. Susunan Acara Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan
4. Organisasi –organisasi yang menjadi bagian Gerakan Perempuan
Mewujudkan Indonesia Beragam
5. Kliping Media



Lampiran 1

Daftar 14 Media Hadir dalam Deklarasi 10 Agenda Politik

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Beritasatu.com | 8. Media Indonesia |
| 2. Harian Kompas | 9. MNC TV |
| 3. Harian Nasional | 10. Prosalinradio.com |
| 4. Jakarta Network | 11. Rakyat Merdeka |
| 5. Kabar3.com | 12. Sayangi.com |
| 6. KBR 68H | 13. The Jakarta Post |
| 7. Kompas TV | 14. Tribun Rakyat |

Lampiran 2.

Panitia Pelaksana

1. Koordinator Indonesia Beragam : Ruby Kholifah
2. Penanggung Jawab Deklarasi : Koalisi Perempuan Indonesia
3. Koord Umum : AMAN Indonesia
4. Koordinator Acara : Koalisi Perempuan Indonesia & Solidaritas Perempuan
5. Koord Tamu & undangan : Kapal Perempuan
6. Koord mobilisasi Media : Migrant CARE
7. Koord Undangan : Solidaritas Perempuan
8. Koord konsumsi : PPSW (Helga)
9. Koord Tempat & Panggung : Koalisi Perempuan Indonesia
10. Dokumentasi : AMAN Indonesia & Koalisi Perempuan Indonesia
11. Koord Keamanan : Cipayung (GMNI, GMKI, KORPRI PMII, PMKRI)
12. Koord Perlengkapan : Kalyanamitra
13. Koord. Pembacaan Deklarasi : Solidaritas Perempuan
14. Penandatanganan Deklarasi : Kapal Perempuan
15. Undangan Partai Politik : Koalisi Perempuan Indonesia
16. Pengundang KOMNAS : AMAN Indonesia
17. Pameran Foto & Instalasi : PEKKA dan Lentera Pembebasan
18. ID Card : Desy
19. Mobilisasi Dampingan /Anggota: AMAN Indonesia, Solidaritas Perempuan, Kalyanamitra, PPSW, PEKKA, KAPAL Perempuan, CIPAYUNG, Koalisi Perempuan Indonesia

Lampiran 3

**SUSUNAN ACARA
DEKLARASI 10 AGENDA POLITIK PEREMPUAN
Gd PERFILMAN USMAR ISMAIL, 7 MARET 2014**

Jam	Kegiatan
09.00 – 18.00	Pameran foto dan Instalasi
13.30 – 14.00	Registrasi
14.00 – 14.10	Tari pembuka (tari betawi)
14.10 – 14.20	Menyanyikan lagu Indonesia Raya
14.20 – 14.30	Sambutan & Pembukaan
14.30 – 14.40	Musik Oppie Andarista
14.40 – 14.50	Orasi Indonesia Beragam
14.50 – 15.00	Musik kel. Mahasiswa
15.00 – 15.10	Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan
15.10 – 15.20	Musik Kel Mahasiswa
15.20 – 15. 40	Pembacaan Rekomendasi/ Agenda (1-5)
15.40 – 15.50	Puisi Olin Montero
15.50 – 16.10	Pembacaan Rekomendasi/ Agenda (6-10)
16.30 – 17.00	Komitmen Partai Politik terhadap Agenda (6 partai)
17.00 – 17.10	Musik Kel Mahasiswa
17.10 – 17.40	Komitmen Partai Politik terhadap Agenda (6 partai)
17.40 – 17.50	Penandatanganan komitmen partai politik
17.50 – 18.00	Penutupan

Lampiran 4

Organisasi yang bergabung dengan GERAKAN PEREMPUAN MEWUJUDKAN INDONESIA BERAGAM :

- | | |
|--|---|
| 1. Aisyiah Jatim, | 31. GMKI Jayapura/Papua |
| 2. Aisyiah Pusat, | 32. GMKI Pekanbaru/Riau |
| 3. Aisyiah Sulsel, | 33. GMNI Manokwari/Papua Barat |
| 4. AMAN Indonesia | 34. GMNI Pasuruan/Jawa Timur |
| 5. Asosiasi LBH APIK Indonesia | 35. GMNI Purwokerto/Jawa Tengah |
| 6. ASPPUK | 36. GMNI Banten, |
| 7. Balai Syura Aceh, | 37. GMNI Kepulauan Riau, |
| 8. Fahmina, | 38. Home Net Indo, |
| 9. FAMM_Indonesia | 39. ICRP |
| 10. Federasi Beudoh Besare Aceh | 40. IGJ |
| 11. Federasi Serikat Pekka Aceh | 41. ILO Jatim, |
| 12. Federasi Serikat Pekka Sulawesi Tenggara | 42. INFID |
| 13. Federasi Serikat Pekka Sumatra Utara | 43. Institut KAPAL Perempuan |
| 14. Federasi Serikat Pekka Sulawesi Utara | 44. ISRE Jember, |
| 15. Federasi Serikat Pekka Nusa Tenggara Barat | 45. JALA PRT |
| 16. Federasi Serikat Pekka Nusa Tenggara Timur | 46. Jaringan ABCD, |
| 17. Federasi Serikat Pekka Sumatra Barat | 47. Kalyanamitra |
| 18. Federasi Serikat Pekka Sumatra Selatan | 48. KAP |
| 19. Federasi Serikat Pekka Jawa Barat | 49. Kaukus Pemimpin Buruh Perempuan |
| 20. Federasi Serikat Pekka Jawa Tengah | 50. Kelompok Perempuan Cipayang (PMKRI, PMII, GMKI, GMNI) |
| 21. Federasi Serikat Pekka Jawa Timur | 51. Koalisi Perempuan Cabang Dompu, |
| 22. Federasi Serikat Pekka DI Yogyakarta | 52. Koalisi Perempuan Cabang Flores Timur, |
| 23. Federasi Serikat Pekka Kalimantan Barat | 53. Koalisi Perempuan Cabang Kabupaten Bima, |
| 24. Federasi Serikat Pekka Kalimantan Selatan | 54. Koalisi Perempuan Cabang Kota Bima, |
| 25. Federasi Serikat Pekka Sulawesi Selatan | 55. Koalisi Perempuan Cabang Mataram, |
| 26. Federasi Serikat Pekka Maluku Utara | 56. Koalisi Perempuan Cabang Ngada, |
| 27. FPMP Makassar | 57. Koalisi Perempuan Cabang Pontianak. |
| 28. Gazira | 58. Koalisi Perempuan Cabang Sikka, |
| 29. GKI Yasmin, | 59. Koalisi Perempuan Cabang Sumba Tengah, |
| 30. GMKI Jailolo/Maluku Utara | 60. Koalisi Perempuan Cabang Sumbawa, |
| | 61. Koalisi Perempuan Cabang Tarakan, |
| | 62. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (SEKNAS) |

63. Koalisi Perempuan Wilayah Aceh,
64. Koalisi Perempuan Wilayah Bengkulu,
65. Koalisi Perempuan Wilayah DI Jogjakarta
66. Koalisi Perempuan Wilayah DKI Jakarta
67. Koalisi Perempuan Wilayah Jambi
68. Koalisi Perempuan Wilayah Jawa Barat,
69. Koalisi Perempuan Wilayah Jawa Tengah
70. Koalisi Perempuan Wilayah Jawa Timur
71. Koalisi Perempuan Wilayah Nusa Tenggara Barat
72. Koalisi Perempuan Wilayah Sulawesi Selatan
73. Koalisi Perempuan Wilayah Sulawesi Tengah
74. Koalisi Perempuan Wilayah Sulawesi Tenggara
75. Koalisi Perempuan Wilayah Sumatera Barat
76. Koalisi Perempuan Wilayah Sumatera Utara
77. KPPA Sulawesi Tengah,
78. KPS2K Surabaya
79. KWS Poso,
80. Lakpesdam Cabang Tasik,
81. Lakpesdam Nu Kota Ambon
82. Lappan
83. LARD Mataram
84. LBH APIK Aceh
85. LBH APIK Bali,
86. LBH APIK Jakarta,
87. LBH APIK Makassar
88. LBH APIK Medan
89. LBH APIK NTB
90. LBH APIK NTT
91. LBH APIK Palembang
92. LBH APIK Palu
93. LBH APIK Papua
94. LBH APIK Pontianak
95. LBH APIK Samarinda
96. LBH APIK Semarang,
97. LBH APIK Yogyakarta
98. LBH Jakarta
99. LPSDM Lombok Timur
100. LSM Bali Sruti,
101. M16 Mataram,
102. Magenta Legal Research & Advocacy,
103. Mahina Ahuru
104. Migrant CARE
105. Mitra Pekerja Rumahan Indonesia,
106. NLC
107. Obor Perempuan Sulbar
108. Our Voice
109. PEKKA
110. Pembangkik Batang Tarandam,
111. Perempuan Mahardhika
112. Perkumpulan Japesda, Gorontalo
113. Permampu-Persada,
114. Pilar Manado
115. Pimpinan Pusat Nasyyatul Aisyah
116. PKBI Pusat
117. PMII cabang Solo,
118. PMII Cabang Tasik,
119. PPSW
120. Rindang Banua
121. Rindang Banua Pontianak,
122. RMI Bogor
123. Salut Manado
124. SAPA
125. Sekolah Perempuan Mandiri Pamona,
126. Sekolah Perempuan Sintuwu Raya Malei,
127. Seniman-Lentera Pembebasan,
128. Serikat Perempuan Lembah Palu,
129. Sekolah Mombine (Sekolah Perempuan),
130. Solidaritas Perempuan
131. Solidaritas Perempuan Aceh,
132. Solidaritas Perempuan Jabotabek
133. Solidaritas Perempuan Makassar,
134. Solidaritas Perempuan Poso,
135. Swara Parangpuan Manado
136. TURC,
137. Wanita Islam AlKhaerat Poso,
138. Yayasan Alfa Omega
139. Yayasan Bakti.
140. YKPM Makassar

Kliping media

Women's Day: Beyond the 37 percent

Ati Nurbaiti, The Jakarta Post, Jakarta | Opinion | Mon, March 10 2014, 10:43 AM

Beyond expectations the final legislative candidates list included 37 percent women or about 74,000 from almost 200,000 across the nation. This was naturally because all the political parties chased after women to avoid being disqualified for not having at least 30 percent of female candidates for the House of Representatives, the provincial and regional legislative councils and the Regional Representative Council (DPD).

The figure alone was a source of a bit of cheer on this year's International Women's Day, though there is considerable whispering about the candidates' qualifications.

A number of women's groups, within and outside the Indonesian Women's Coalition (KPI), are organizing a series of events until next month in conjunction with the international day. They aim to ensure that regardless of how many women actually make it to the legislative bodies, the resulting policies will benefit the grassroots, including women who make up over 49 percent of the population.

This is the right approach, as women have realized that despite the minimum percentage of female candidates much less will be elected and even less will likely push for policies that would "benefit the grassroots". And to be able to ensure such policies the women's movement needs to show it can network widely and influentially across the parties.

In a bid to get better policies than those deliberated over the last five years, the women activists said they would have to work much more intensively with lawmakers. Coalition of Indonesian Women for Justice and Democracy (KPIKD) secretary-general Dian Kartikasari acknowledged Friday that there were many more meaningful laws resulting from the House's 2004 batch, compared to the 2009 one, which had the highest percentage of women lawmakers in Indonesian history — 18 percent of the 560 members.

As part of consolidating forces the women's groups, together with student organizations, particularly the women, launched the Movement for Plural Indonesia on Friday — Gerakan Indonesia Beragam. While beragam means plural, they said it stood for an Indonesia that should be sovereign, clean from corruption, just, gender sensitive and diverse.

Among others trends of fundamentalism threatening the interests of women, said Misiyah of the Kapal Perempuan (Women's Ship) Institute, the reproductive rights of women are even more ignored, she said. The high maternal mortality rate of 359 for every 100,000 live births is dragging the country back to almost a decade ago, she said.

While many factors are responsible for these women dying in labor or pregnancy, Misiyah said it was patriarchy that contributed heavily to decisions regarding women, mainly in poor households, in need, which resulted in late access to medical help.



Anis Hidayah, leader of Migrant Care, blamed “gender-blind” policies that failed to protect the millions of — mainly female — migrant workers; dozens are dying by the day, yet, the budget to protect them has decreased, she said.

How many of the newly elected lawmakers will understand issues like this? This is the concern of the women’s movement, which realizes that women politicians more or less share the blame for lack of influence on decision makers. The women and men who will win the legislative elections would mostly include incumbents. Of the current candidates, the KPI’s Dian said 18 percent of women were likely to get elected — those numbered 1 to 3 by their political parties on the ballots. About a quarter were assigned lower numbers, a sign that they were not considered serious contenders by their parties.

Political analyst Ani Soetjipto says as political parties virtually grabbed women to avoid disqualification, it’s better to reserve more hope of more quality women candidates for the 2019 elections. But within and outside the legislative bodies, it is urgent that women groups work as closely as possible with decision makers from whatever political faction. Not many activists look thrilled even though many of their own have been recruited by the political parties.

As making up almost half the population “women are the main targets of transactional politics,” said another activist. A founder of the Women-headed Household Association (Pekka), Nani Zulminarni, says thousands of its members had been asked to support almost 30 fellow members recruited into diverse parties.

But she expressed concern that these women, who lead a few dozen to a few thousand in their communities, had been driven into a lion’s den. “Never mind, they’ll come out tougher,” says Nani. Pekka aims to accompany these women regardless if they win or lose, she added.

The question is how the women’s movement will be able to accompany female and male lawmakers from the local to national level. Activists have acknowledged that the movement has not managed to become as solid as other powers that have emerged from decentralization

The most painful evidence includes local sharia-inspired bylaws, which potentially discriminate women. Women activists widely protested one of the first such bylaws in the city of Tangerang in Banten; they lost the lawsuit and many other similar bylaws cropped up in other cities and regencies. Women’s voices were united against violence, as clearly shown in the passing of the law on domestic violence. But when policies touch on morality, these are the hardest test of women’s clout, as many women willingly and proudly rally for symbols of their community’s identity, such as the pious Muslim.

Ahead of the 2014 elections the women’s movement has little time to strengthen its unity, while power seekers seek their participation in a system where they must figure out and maneuver space to influence decisions. Some of their idealists, if elected, might rot as many incumbents fear. An attempt to remind incumbents and new politicians of their commitment to a more-just society includes the planned rallies

and dialogues in the following weeks in 53 regencies and municipalities, just one part of bringing together the older and new generation of the women’s movement. Such efforts are small steps, but remain crucial. They must continue if women hope to move beyond mere figures of their representation.

The author is a staff writer at The Jakarta Post.

People ‘less apathetic’ to female leaders

Ati Nurbaiti, The Jakarta Post, Jakarta | Election Watch | Tue, March 11 2014, 10:02 AM

Attitudes toward female leadership have changed ahead of the 2014 legislative election, as people have begun to be less apathetic toward them, activists working across Indonesia have said.

Sutriyatmi of the Indonesian Womens’ Coalition (KPI) said on Friday that people in areas that lacked sufficient public services appreciated the work of local women, who helped residents access valuable resources and services. Compared to the 2009 election, when many were still indifferent toward women candidates, Sutriyatmi said she hardly ever heard: “What can she really do?”

In a number of areas in East and West Nusa Tenggara, she said, it was the women who helped villagers source the scarcely available seeds ahead of the planting season, as well as helping them to apply for national health insurance (JKN).

“The JKN has been announced at the national level but little information has reached the localities,” Sutriyatmi told The Jakarta Post.

Sutriyatmi was interviewed following the nationwide launch of the Women’s Movement for a Diverse Indonesia (Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam) in Jakarta to coincide with International Women’s Day.

On Saturday, a similar launch was held by women’s groups, including local branches of the KPI, in places such as Bengkulu and Makassar, South Sulawesi. The women’s groups are holding a month-long series of events such as rallies, discussions and exhibitions to campaign their “10-point political agenda”, which seeks to ensure equality and the protection of marginal groups including women.

KPI secretary-general Dian Kartikasari told the Post on Saturday that “if we could consolidate the women’s movement in the next five years, we should be able to keep a close watch on the forming of policies at the national and local level”.

She had earlier acknowledged that despite the House of Representatives having the highest percentage of women — 18 percent from 560 members from the 2009 general election — the House passed too few laws that “benefited the grass roots”.

The women’s movement now is trying to be more united to ensure legislators pass laws that ensure more “justice”, Dian said.

An activist and legislative candidate from the National Mandate Party (PAN) running for the West Java legislative council in the Garut regency said that according to her observation, women politicians at the provincial level had proved to be more committed to their work than those at regency and municipal levels.

The local-level councilors were in “shock”, said Otang Qodariyah, KPI West Java secretary, as they had not expected to be elected in 2009, and did not show improvement despite attempts to train them.

The KPI observed that 18 percent of women legislators across the 77 electoral districts were ranked in the top tiers by their parties, meaning their chances of winning seats were slightly higher than candidates placed by their parties in lower tiers.

The General Elections Commission (KPU) has said that of the 6,607 contesting the 560 seats in the House, 37 percent, or 2,467, are women.

The 10-point political agenda of the Women’s Movement for a Diverse Indonesia:

1. Fulfillment of reproductive rights and sexuality
2. Ensuring the right to education
3. Ending violence against women
4. Ending poverty among women and the marginalized through social protection
5. Protection of women in situations of conflict, disaster, environmental exploitation
6. Ensuring the right to decent jobs for women and providing protection for migrant workers and women in the informal sector
7. Protection of freedom of faith and worship
8. Ensuring women's political rights
9. Revoking laws that discriminate marginal groups
10. Ending corruption

Pemerintah RI Baru Diharapkan Lebih Penuhi Hak Perempuan

Pemerintahan baru setelah Pemilu 2014 diharapkan melakukan perbaikan pemenuhan hak-hak perempuan. **10.03.2014/VOA**

JAKARTA/SURABAYA — Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh tanggal 8 Maret, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Gerakan

Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam mendeklarasikan 10 agenda politik perempuan di Gedung Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta, akhir pekan lalu

Deklarasi 10 agenda politik perempuan ini juga dilakukan karena penyelenggaraan pemilihan umum 2014 yang tinggal 30 hari. Perwakilan 12 partai politik hadir dalam acara ini dan menandatangani 10 agenda politik perempuan tersebut.

Direktur Institut Kapal Perempuan, yang juga merupakan salah satu koordinator acara, Missiyah mengatakan tujuan pendeklarasian ini untuk mendesak agar 10 agenda politik perempuan menjadi salah satu agenda pemerintahan baru nanti.

10 agenda politik perempuan tersebut adalah pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksualitas, pemenuhan hak atas pendidikan, penghentian kekerasan terhadap perempuan, penghentian pemiskinan perempuan dan kelompok marginal melalui perlindungan sosial, perlindungan perempuan dalam situasi konflik, bencana serta pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

Selain itu, pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi perempuan, perlindungan atas kebebasan berkeyakinan, hak politik perempuan, penghapusan produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas serta penghentian korupsi.

Missiyah menilai selama ini persoalan perempuan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dia mencontohkan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat menandakan pemerintah kurang serius menangani hal tersebut. Saat ini lanjutnya angka kematian ibu berjumlah 359 per 100 ribu kelahiran hidup

Dia menyatakan sejak reformasi bergulir, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap nasib perempuan miskin yang rentan. Perempuan, tambah, masih sering mendapatkan diskriminasi, eksploitasi dan pemiskinan. Untuk itu, kata Missiyah, pemerintahan baru nantinya diharapkan melakukan perbaikan pemenuhan hak-hak perempuan.

“Pertama, menyediakan kebijakan-kebijakan yang mempunyai responsif atau mempunyai perspektif gender dan juga penganggarannya. Itu rumus utama karena itulah tugas pemerintah untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang memang menyentuh problem-problem masyarakat miskin dan perempuan,” ujarnya.

Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan Indonesia menjelaskan masih banyak partai yang kurang memahami perspektif perempuan.

“Kita percaya bahwa untuk mengatasi keterpurukan perempuan ini, 10 agenda tersebut menjadi penting untuk diatasi. Kemudian kita lihat bahwa ini adalah awal keterpurukan perempuan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hak atas pekerjaan, hak politik dan yang lainnya,” ujarnya.

Anggota Komisi Hukum DPR yang juga kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menyatakan, sangat sulit memperjuangkan hak perempuan di DPR karena tidak semua anggota legislatif memiliki perspektif tentang perempuan.

Dia mengatakan partai politik seharusnya memilih calon legislatifnya berdasarkan komitmen yang baik.

“Makanya merekrut orang jelas targetnya, misinya harus jelas bukan hanya sosok perempuan tetapi perspektifnya itu loh yang penting,” ujarnya.

Gerakan Perempuan Wujudkan Indonesia Beragam



Bagan 1 LIMA PERWAKILAN PEREMPUAN MUDA MEMBACAKAN AGENDA POLITIK PEREMPUAN, 7 MARET 2014, GD USMAR ISMAIL

Jakarta - Enam puluh lembaga kewanitaannya menginisiasi sebuah tujuan Indonesia Beragam. Hal tersebut disuarakan dalam "Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam", di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, JUmah (7/3).

Lembaga yang ikutserta diantaranya AMAN Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Institut KAPAL Indonesia, dan Migrant Care. Indonesia Beragam adalah Indonesia Berdaulat, Bersih, Sejahtera, Adil Gender, dan Majemuk.

Untuk mencapai hal tersebut, di kesempatan yang sama mereka mendeklarasikan 10 agenda politik, yaitu; 1) pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksualitas, 2) pemenuhan hak atas pendidikan terutama pendidikan perempuan

3) penghentian kekerasan terhadap perempuan, 4) penghentian pemiskinan perempuan dan kelompok marginal melalui perlindungan sosial, 5) perlindungan perempuan dalam situasi konflik, bencana, serta pengelolaan sumber daya alam, 6) pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi perempuan, 7) perlindungan atas kebebasan berkeyakinan dan beragama, 8) hak politik perempuan, 9) penghapusan produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas, dan 10) penghentian korupsi.

Dwi Ruby Kholifah, sebagai perwakilan dari AMAN Indonesia menyampaikan keprihatinannya pada kondisi perempuan di Indonesia. Ia menghimbau kepada masyarakat, khususnya perempuan agar mengontrol anggota legislatif perempuan membantu menggapai Indonesia Beragam.

"Ibu-ibu yang di sini tolong monitor anggota dewannya, agar dalam 5 tahun ke depan ini terus berupaya mewujudkan 10 agenda politik ini," ujar Ruby.

Ruby menyampaikan data bahwa dari 1000 ibu melahirkan di Indonesia, ada 359 kematian ibu. Ia juga memaparkan bahwa dari 6,7 juta penduduk Indonesia yang buta huruf, 60 persennya adalah perempuan.

Penulis: Muhammad Fajar/FAB-BERITA SATU.COM, Sabtu, 8 Maret 2014